

BAB II

DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA PROSES PERDAMAIAN YANG TERJADI ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

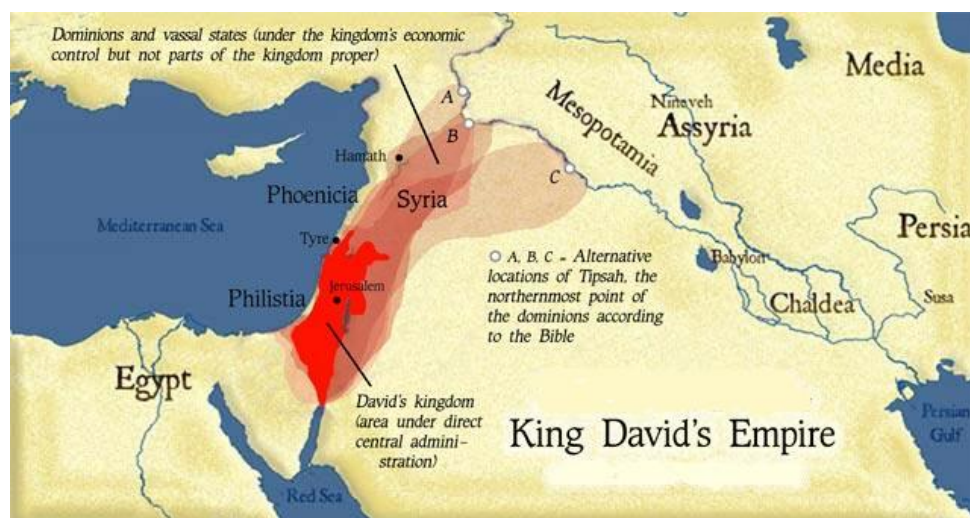
Konflik yang terjadi antara bangsa Arab dan Israel hingga saat ini masih menjadi isu yang dinamis. Dengan kompleksitas permasalahan suku, agama, ras dan budaya menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari segi historis, konflik Arab-Israel sendiri telah berakar cukup lama, dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antara aktor-aktor konflik. Bab ini merupakan tinjauan historis mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang penulis paparkan secara singkat dan jelas, berisikan tentang penjelasan sejarah awal mula konflik, perlawanan negara-negara Arab, perlawanan bangsa Palestina terhadap Israel dan juga transformasi hubungan kedua belah pihak menuju perdamaian. Penjelasan masing-masing bagian dari bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang singkat namun efektif tentang perkembangan konflik dan perubahan hubungan antara Israel dan Palestina dari masa ke masa.

A. Sejarah Awal Konflik

Tanah yang sekarang diperebutkan dan menyebabkan konflik berkepanjangan antara bangsa Arab dengan Israel pada awalnya dihuni oleh orang-orang yang berasal dari Semenanjung Arab di kawasan tepi barat sungai Yordan. Pada periode 1800-an sebelum Masehi, kehidupan masyarakat didekat sungai Yordan tersebut kian berkembang setelah kedatangan Ibrahim dan rombongan nya yang bermigrasi dari Ur (saat ini Babilonia atau Irak). Pada tahun 1000 sebelum masehi, kaum Yahudi keturunan keturunan Yehuda cucu

dari Ibrahim kembali membangun peradabannya dibawah kepemimpinan Daud hingga akhirnya dilanjutkan oleh putranya Sulaiman. Pada saat itulah didirikan Istana Sulayman (*Haykal Sulayman*) yang oleh kaum Yahudi diyakini dibangun diatas bukit Zion di Yerusalem Barat. (Jatmika 2014)

Wilayah ini merupakan wilayah yang pendudukannya sangat dinamis karena dalam kurun waktu yang cukup panjang, banyak pihak yang menduduki atau berhasil menguasai tempat ini dari mulai Assyria, Babilonia hingga Romawi yang merebut wilayah pada tahun 66-67 Masehi. Pada masa kekaisaran Romawi kaum Yahudi mulai terusir dari tanah mereka karena penguasa Romawi Hadrianus Caesar melarang Yahudi untuk bermukim di wilayah itu lagi. Akibatnya, kaum Yahudi semakin terdesak dan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah untuk mencari suaka seperti negara-negara Afrika Utara dan juga ke beberapa negara di Eropa. Setelah Romawi dipukul mundur, kaum muslim dibawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab mulai menguasai Yerusalem dan hampir seluruh wilayah Palestina hingga akhirnya pada tahun 1517 Palestina beralih dikuasai oleh Turki Utsmaniyah atau lebih dikenal dengan Turki Ottoman.



Gambar 0.1 Peta Kerajaan Daud

Persoalan Palestina mencuat menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat runtuhnya kekuasaan Turki Ottoman, pada saat itu akhirnya Palestina berada di bawah administrasi Inggris. (Yuliantiningsih 2009) Ketika Inggris memegang kekuasaan wilayah atas Palestina, ternyata kaum Yahudi yang berada di Eropa menginginkan untuk kembali ke tanah nenek moyang mereka karena secara teologis, zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam Perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai ‘tanah yang dijanjikan tuhan’ (*promised land*) untuk bangsa Israel, sebaliknya secara historis, rakyat Palestina menyatakan kami bangsa Palestina berada di negeri ini sejak zaman Umar bin Khatab. (Ilyas 2009)

Pada tahun 1897, keinginan kaum Yahudi semakin memuncak dengan diadakannya Kongres Zionis Internasional untuk pertama kalinya di Basel, Swiss. Dalam kongres ini terbentuklah dua kubu Zionisme, yaitu Zionis Budaya dan juga Zionis Politik. Pemikiran dari kedua kubu ini sedikit berbeda di mana Zionisme Budaya menginginkan kaum Yahudi untuk kembali ke Tanah Zion untuk sekedar melestarikan budaya Yahudi, sedangkan pihak Zionisme Politik memiliki pandangan untuk mengajak seluruh diaspora Yahudi didunia kembali ke Tanah Zion dan mendirikan sebuah negara Yahudi (*A Jewish State for Jewish People*). (Jatmika 2014)

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 1917. Inggris mencanangkan Deklarasi Balfour, yang dipandang sebagai janji oleh pihak Yahudi dan Arab untuk mendirikan sebuah negara atau tanah air untuk kaum Yahudi di Palestina. Deklarasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour yang ditujukan kepada Lord

Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild) yaitu pemimpin komunitas Yahudi Inggris.

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."
(McDowall 1990)

Seketika setelah Inggris melepaskan tanggung jawab atas mandatnya di Palestina yang dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Britania Raya untuk diadministrasikan pada masa setelah Perang Dunia Pertama sebagai sebuah Wilayah Mandat pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman yang telah menguasai wilayah ini sejak abad ke-16, Kaum Yahudi memproklamkan kemerdekaan atas negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 setelah adanya persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 1947 untuk dilakukan pembagian wilayah atau *partition plan* yang akhirnya memicu Perang Arab-Israel. (PALESTINE 1947)



Gambar 0.2 Deklarasi Kemerdekaan Israel

Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. (Britannica 2009) Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang belum berhasil.

B. Dinamika Konflik Israel – Palestina

Jika ditinjau dari latar belakang sejarah, konflik Israel-Palestina merupakan bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas sejak 1940-an. Perjuangan bangsa Palestina melawan kaum Yahudi dimulai seketika pasca hengkangnya Inggris dari Palestina. Setelah diproklamirkan nya Negara Israel, pasukan negara Suriah, Yordania, Mesir dan Irak masuk ke Palestina untuk mendukung bangsa Arab Palestina dalam memerangi Israel. Pada awalnya mereka memperoleh kemenangan gemilang, namun Israel melancarkan serangan balasan dibantu oleh pasukan koalisi Eropa dan Amerika dengan persenjataan yang lebih mutakhir. Pertempuran yang tidak seimbang itu berakhir dengan kekalahan di pihak Arab yang berimbas pada eksodus besar-besaran bangsa Arab Palestina sehingga mereka menjadi bangsa yang tidak mempunyai tanah air. (Fuhaidah 2012)

Berikut ini adalah beberapa peperangan yang terjadi antara pasukan Palestina melawan Israel dalam kronologi konflik Israel-Palestina:

1. Perang 1948

Perang ini dipicu oleh proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Selain itu, kegagalan PBB dalam menyelesaikan sengketa Yahudi-Arab Palestina melalui Rencana Pembagian Palestina (*Palestina Plan*) tahun 1947 dan propaganda Yahudi tentang peristiwa Holocaust sebelum Perang Dunia II juga menjadi penyebab utama munculnya perang ini. Berbagai peristiwa tersebut kemudian memunculkan reaksi dari beberapa negara tetangga seperti Mesir, Transjordania, Irak, dan Suriah yang melakukan penyerangan terhadap Israel yang baru merdeka. (Fuhaidah 2012)

Akibat dari perang ini Israel menguasai 77% wilayah Palestina termasuk menguasai teluk Aqaba sehingga memudahkan mengakses jalur laut dengan negara-negara Arab tetangganya. Ini berarti bahwa bangsa Arab Palestina kehilangan wilayahnya secara total karena Jalur Gaza menjadi wilayah Mesir dan West Bank menjadi milik Yordania di tahun 1950. Bangsa Arab Palestina menjadi bangsa yang tersebar (diaspora) karena meninggalkan Palestina ke wilayah Yordania maupun Mesir, Libanon, dan Suriah.

2. Perang Suez 1956

Perang Suez muncul karena Presiden Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez yang berada di bawah kepemilikan Anglo-French Suez Canal Company. Ia mengharuskan semua kapal yang melewati Teluk Aqaba untuk meminta izin kepada pemerintah Mesir. Berdasarkan ketetapan ini, maka aliansi tiga kekuatan besar yaitu Inggris, Perancis, dan Israel menyerang Mesir, Inggris menyerang Suez dan Israel menyerang Sinai. Selain faktor di atas, Israel melancarkan serangan ke Mesir bertujuan

untuk melemahkan para gerilyawan Palestina karena semua kebutuhan logistik dan persenjataan Palestina diselundupkan dari negeri ini. (Fuhaidah 2012)

Akibat perang ini memunculkan reaksi keras di kalangan dunia internasional. PBB ikut berperan menyelesaikan konflik dengan menempatkan pasukan khusus *United Nations Emergency Force* (UNEF) di sepanjang perbatasan Mesir-Israel. Sementara Perancis dan Inggris kehilangan *prestise* di dunia internasional karena kehilangan hak atas Terusan Suez. (Fuhaidah 2012)

3. Perang Enam Hari (5-11 Juni 1967)

Perang ini sebagai buntut panjang perselisihan perang Suez yang berkecamuk sebelumnya. Mesir menganggap bahwa penempatan pasukan PBB di wilayah perbatasan sebagai bentuk provokasi. Untuk itu, pada bulan Mei 1967 Mesir meminta agar UNEF meninggalkan Sinai, termasuk Sharm al-Shaykh. Mesir juga menutup Teluk Aqaba bagi pelayaran Israel. (Fuhaidah 2012)

Akibat peperangan ini, Israel memperoleh tiga kali lipat wilayah yang diperoleh pada perang 1948. Israel menduduki semenanjung Sinai termasuk Sharm al Syakh Selat Tiran, Jalur Gaza, The West Bank, Dataran Tinggi Golan, dan semua wilayah Jerussalem. (Long 1980) Dengan demikian Israel menjadi negara yang secara militer diperhitungkan di dunia Arab dan menjadi salah satu negara militer yang terkuat di dunia.

4. Perang Karameh 1968

Pada bulan Maret 1968, sebuah serangan Israel ke kota Karameh menyulut pertempuran dengan gerilyawan Palestina di Yordania. Akibat perang ini Israel

mengalami kekalahan sehingga mendorong semangat juang bangsa Palestina untuk membebaskan diri. (Sihbudi 2004)

5. War of Attrition 1970

Setelah perang enam hari 5-11 Juni 1967, terjadi insiden serius di Terusan Suez. Tembakan pertama dilepaskan 1 Juli 1967, ketika pasukan Mesir menyerang patroli Israel, dan ini merupakan awal dari perang War of Attrition. (Fuhaidah 2012)

6. Perang Ramadhan / Yom Kipur 1973

Pada tanggal 6-25 Oktober 1973, terjadi perang antara Israel dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini dimulai dengan adanya serangan mendadak negara-negara Arab pada saat Yom Kippur yang merupakan hari paling suci bagi umat Yahudi dan saat itu juga bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

Perang dimulai dengan sukses oleh Mesir yang berhasil menyerang dari sisi selatan wilayah Israel selama tiga hari pertama dan bisa menduduki wilayah yang hanya berjarak 5 kilometer saja dari Tel Aviv. Di sisi utara, Suriah juga berhasil menyerang Israel dari bukit Golan. Keberhasilan ini ternyata tidak bertahan lama setelah militer Amerika Serikat membantu Israel untuk melawan negara-negara Arab dan dalam waktu seminggu Israel sudah kembali pulih. Setelah stabilitas kembali terjaga Israelpun melakukan tindakan kontra-ofensif terhadap Mesir dan Suriah dimana pasukan Israel berhasil masuk hingga 40 kilometer dari Damaskus dan menembus melewati terusan Suez yang berjarak 101 kilometer dari Kairo. (Jatmika 2014)

Konflik ini akhirnya bisa diakhiri dengan gencatan senjata dalampengawasan PBB. Pasca terjadinya perang ini bangsa Arab melakukan embargo minyak kepada negara-

negara yang dianggap mendukung Israel seperti Amerika Serikat, Negara-negara Eropa Barat dan juga Jepang. (Bregman 1947)

7. Konflik Palestina di Lebanon

Lebanon menjadi pusat gerilyawan Palestina setelah terjadi tekanan oleh rezim Yordania pada 1970-1971. Perang Sipil berkobar pada Mei 1975 oleh serangan bom kaum palangis dalam sebuah bus yang ditumpangi rombongan Palestina. kekerasan puncak terjadi pada kamp pengungsian Palestina *Teel Zataar* di Beirut Timur. (Fuhaidah 2012)

8. Perang Arab-Israel 1982

Setelah tahun 1983, dapat dikatakan hampir tidak ada deklarasi perang tetapi yang ada ialah tindakan kekerasan. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak Palestina maka akan disebut sebagai tindakan teror, dan apabila dilakukan oleh Israel akan disebut sebagai tindakan defensif. (Fuhaidah 2012)

Perjuangan melawan Israel dilalui melalui beberapa fase. Sejak tahun 1948-1967, negara-negara Arab menjadi pimpinan dalam perjuangan, namun pasca kekalahan mereka pada perang 1967 Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi wakil perjuangan Palestina. Organisasi ini didirikan pada 1964 sebagai sebuah front pembebasan yang di dalamnya mencakup beberapa faksi seperti Faksi Fatah pimpinan Yasser Arafat dan memperjuangkan kebebasan melalui cara diplomatik (Wikipedia, Organisasi Pembebasan Palestina 2016), namun usaha diplomatik ini dinilai tidak akan mampu mengantarkan pembebasan Palestina, karenanya kemudian muncul gerakan perlawanan di luar PLO seperti *Intifadah* di West Bank, dan Hamas serta Jihad Islam di Jalur Gaza.

Kelompok ini memperjuangkan Palestina dengan cara yang sangat keras dan bahkan seringkali melakukan bom bunuh diri di tempat umum wilayah Israel. (Siti Maryam 2003)

9. Intifadhah Pertama

Intifadhah Pertama yang terjadi sepanjang tahun 1987 hingga tahun 1993 adalah pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Palestina pada tanggal 9 Desember 1987. Pemberontakan dimulai di kemah pengungsi Jabalia dan dengan cepat menyebar ke seluruh Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. (Zachary Lockman 1989)

Kekerasan merupakan ciri penting dari intifadhah, dengan eksekusi orang yang dituduh sebagai pendukung Israel. Diperkirakan 1.100 orang Palestina dibunuh oleh tentara Israel dan 164 orang Israel dibunuh oleh orang Palestina. Selain itu, diperkirakan 1.000 orang Palestina dibunuh oleh orang Palestina karena dituduh sebagai pendukung Israel. Pemberontakan ini baru diakhiri pada tahun 1992.

10. Kerusuhan Terowongan al Aqsha 1996

Kerusuhan ini terjadi karena pihak Israel sengaja membuka terowongan Masjid al Aqsha untuk memikat para turis dan membahayakan fondasi mesjid bersejarah, pertempuran berlangsung beberapa hari dan menelan korban jiwa.

11. Intifada al-Aqsa (2000-2005)

Pada 28 September 2000, Kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa memicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Akhirnya Intifadah gelombang kedua pun dimulai. Penistaan dan penodaan yang dilakukan Ketua partai Likud, Ariel Sharon beserta 1200 tentara yang

mengawalnya masuk ke masjid Al-Aqsha pada 28 September 2000 menjadi klimaks dari penganiayaan dan penistaan terhadap Palestina. Berbagai kecaman dan protes datang dari Dunia Islam. Bagi rakyat Palestina, peristiwa tersebut sangat menghinakan harga diri dan kehormatan mereka. (Pressman 2003)

Bentrokan yang terjadi antara Palestina dan pasukan Israel terus berlanjut di akhir tahun 2000 dan sepanjang tahun 2001. Menanggapi serangan para pejuang Palestina, Perdana menteri Ariel Sharon pada masa pemerintahannya menerapkan *hard military solution* yang diterapkan melalui kebijakan *Operation Defense Shield* pada Maret 2002. (Avi Issacharoff 2012)

Ditengah kecaman keras dari masyarakat atas kebijakan yang pernah dilakukannya, setelah Ariel Sharon terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel pada pemilu 28 January 2003 dirinya memutuskan untuk mengaplikasikan kebijakan Disengagement Plan pada Agustus 2005 dalam konferensi Herzliya. Kebijakan ini secara tidaklangsung mengakhiri babak Intifada kedua yang sudah terjadi sejak tahun 2000 silam. Pihak Israel akhirnya menarik mundur pasukan pertahanannya dari Palestina dan memindahkan warga Israel dari pemukiman di Gaza.

12. Serangan Israel ke Gaza 2008

Konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang terjadi setelah kedaluwarsanya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara, disebut *Operation Cast Lead* terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Dalam "*Operation Cast Lead*", Israel mengerahkan kekuatan secara penuh dari berbagai lini. Diawali dengan serangan udara pada beberapa hari,

kemudian dikombinasikan dengan serangan darat disertai dengan pengepungan di laut Mediterania yang berbatasan dengan Jalur Gaza. (REUTERS 2009)

"*Operation Cast Lead*" ini mengalami kegagalan di dalam mencapai tujuannya, karena meskipun dinyatakan selesai pada tanggal 18 Januari 2009 namun, roket kelompok Hamas masih terus ditembakkan ke wilayah Israel. Akibat dari serangan ini sekitar 1.400 jiwa tewas dan mencederai 5.000 warga Palestina. (Agus Sugianto 2013)

13. Blokade Bantuan Internasional

Pada Mei 2010 Israel mem-blokede seluruh jalur bantuan menuju Palestina. Hal yang menjadi sorotan dunia Internasional adalah ketika Tentara Israel Menembaki kapal bantuan *Mavi Marmara* yang membawa ratusan relawan dan belasan ton bantuan untuk Palestina. Dalam kasus Israel telah melanggar hukum Internasional karena telah menyerang non-kombatan terutama relawan yang dikirim untuk misi kemanusiaan.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa terdapat 9 korban tewas dan 60 korban luka dari pihak aktivis, serta 10 korban luka dari pihak Angkatan Laut Israel. Kedua pihak mengklaim bahwa kekerasan terjadi dalam rangka mempertahankan diri.

14. Peningkatan Serangan Udara

Militer Israel kembali meningkatkan serangan udara terhadap warga Palestina. Mereka tidak tinggal diam ketika seorang tentaranya tewas dalam baku tembak antara militan Palestina dan militer Israel di perbatasan Gaza-Israel.

Seperti diberitakan dalam Xinhua, Rabu (6/6/2012), Angkatan Udara Israel melancarkan serangan saat fajar. Pesawat perang F16 Israel menjatuhkan dua bom di dekat pos penjagaan polisi Hamas. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, akibat

serangan ini sedikitnya dua orang warga Palestina luka serius. (Syelvia 2012) Setelah tiga hari terlibat aksi pertempuran di wilayah perbatasan, akhirnya militan Hamas dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata.

Pertempuran antara militer Hamas dan Israel pecah di daerah gurun Sinai. Pertempuran ini bermula karena kelompok Shura Council of Mujahideen memulai serangan di gurun Sinai, perbatasan Mesir dan Israel. Akibat serangan tersebut dua warga Israel dan dikabarkan tewas. Militer Israel yang tidak terima dengan aksi penyerangan tersebut melakukan serangan balasan dengan melakukan kontak senjata dan serangan udara. Dua penyerang Shura Council of Mujahideen dilaporkan tewas dalam serangan pertama.

Seorang dokter di Palestina mengatakan, selama tiga hari serangan udara Israel di jalur Gaza banyak nyawa hilang. Sedikitnya sembilan orang dilaporkan tewas dan 17 orang warga sipil Palestina menderita luka-luka. Aksi balasan yang dilakukan oleh tentara Israel dinilai sangat berlebihan dan tidak proposional. Militan di jalur Gaza hanya menyerang dengan menggunakan roket, sementara Israel menyerang dengan bantuan jet tempur. (Yesi Syelvia 2012)

Dinamika konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak berhenti disini, karena hingga menjelang pemilu raya Israel tahun 2013 ketegangan antara kedua belah pihak masih terus terjadi walaupun tidak memakan korban jiwa sebanyak perang-perang sebelumnya.

C. Upaya Proses Perdamaian Antara Israel dan Palestina

Konflik Palestina-Israel telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi dunia Arab maupun internasional. Persoalan Palestina-Israel bahkan seringkali dianggap sebagai pertarungan Yahudi-Islam sebagai satu agama, sehingga banyak pihak berkepentingan menyelesaikan pertikaian mereka mulai dari negara-negara di kawasan Arab bahkan sampai Amerika. PBB sebagai satu organisasi keamanan dunia pun tidak tinggal diam dalam mengupayakan penyelesaian konflik dengan mengeluarkan beberapa resolusi seperti: Resolusi PBB No 242 pasca Perang 1967 yang memerintahkan agar Israel keluar dari wilayah Palestina; Resolusi PBB No 338 pasca perang 1973; Resolusi No 42 pasca perang 1982 dan resolusi-resolusi lain yang intinya mengatur perdamaian ke dua pihak. Akan tetapi tidak satu pun dari resolusi-resolusi tersebut yang dipatuhi oleh Israel. Akibatnya konflik berkembang semakin luas dan penuh dengan kekerasan, serta banyak memakan korban. Meskipun demikian tindakan-tindakan kekerasan tidak mampu memperbaiki nasib bangsa Palestina. Selain dikeluarkannya resolusi oleh PBB, tidak sedikit pula perundingan damai yang diupayakan untuk menyelesaikan konflik seperti berikut:

1. Perjanjian Camp David 1978

Perjanjian Perdamaian Camp David ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk perdamaian di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. (Jatmika 2014) Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para presiden AS, Camp David, di Frederick County, Maryland. Perjanjian ini menghasilkan

satu putusan yaitu pengakuan Israel oleh Mesir, dan sebagai imbalannya Israel menarik pasukannya dari Sinai. Sayangnya perjanjian ini tidak berhasil karena perang Arab-Israel kembali berkobar. (Wikipedia 2015)

2. Konferensi Perdamaian Madrid 1991

Setelah sukses mendamaikan Mesir dan Israel lewat perjanjian Camp David 1978, maka langkah selanjutnya adalah mengajak negara-negara Arab lainnya untuk mengikuti jejak Mesir, yaitu berdamai dengan Israel. Untuk tujuan ini maka AS dan Uni Soviet menjadi sponsor Konferensi Madrid 1991. Dalam konferensi ini negeri-negeri Arab lainnya seperti Jordania, Lebanon, dan Suriah diundang selain Mesir dan Israel. Dalam pertemuan ini Palestina juga terlibat dalam pembicaraan, tetapi sebagai anggota delegasi Jordania dan bukan diwakili para pemimpin Palestina saat itu seperti Yasser Arafat karena Israel menolak kehadiran Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Konferensi ini dimulai pada 30 Oktober dan berakhir 1 November 1991. Konferensi ini kemudian diikuti dengan negosiasi bilateral antara Israel dan delegasi gabungan Jordania-Palestina, serta Lebanon dan Suriah. (Harian Kompas 2014)

Salah satu hasil dari rangkaian perundingan ini adalah perjanjian damai Israel dan Jordania yang ditandatangani pada 26 Oktober 1994 di Lembah Areva, Israel, di dekat perbatasan Israel-Jordania. Perjanjian itu ditandatangani PM Israel Yitzak Rabin dan PM Jordania Abdelsalam al-Majali. Sementara itu, Presiden Israel Ezer Weizman dan Raja Jordania Hussein bersalaman hangat. Perjanjian damai kedua negara itu disaksikan Presiden AS Bill Clinton dan Menlu Warren Christopher. Mesir menyambut baik perjanjian itu, sementara Suriah menanggapi dingin dan perundingan damai antara Israel

dan Lebanon juga macet.

Sementara itu, Lebanon dengan tegas menolak perdamaian itu, bahkan 20 menit sebelum upacara penandatanganan kesepakatan, Hezbollah menyerang kota Galilea di wilayah utara Israel.

3. Konferensi Washington

Konferensi Washington membahas dua isu pokok pemberian otonomi pemerintahan sendiri yang terbatas dengan melibatkan Amerika Serikat dan Uni Sovyet sebagai sponsor. Serta Yordania – Palestina, Lebanon, dan Suriah. Didalam konferensi terlihat jelas Israel kurang begitu serius mengikuti perundingan, yang dibuktikan dengan pengusiran dan pendeportasian pemuda Palestina menjelang perundingan. Dalam perundingan ini PBB memihak PLO dengan dikeluarkannya Resolusi melalui Dewan Keamanan yang menegaskan bahwa tindakan dari tentara Israel melanggar Konvensi Jenewa IV yang berisikan perlindungan atas warga sipil di daerah pendudukan. Setelah banyak terjadi polemic sebelum diadakannya konferensi akhirnya konferensi Washington berhasil dilaksanakan dengan membahas rencana pemberian otonomi kepada rakyat daerah pendudukan secara terbatas. (Ridho 2015)

Setelah mengalami perundingan sengit dan tidak tercapainya mufakat maka perundingan ini ditunda. Perundingan kembali dimulai pada tanggal 7 Januari 1992 tetapi Israel menolak menerapkan prinsip land for peace dan menunda kembali perundingan. Perundingan kembali dilakukan pada tanggal 24 Februari – 4 Maret 1992, dengan fokus utama tetap membahas otonomi bagi daerah pendudukan. Sikap Yitzak Shamir menekankan pada otonomi pemerintahan terbatas bagi penduduk jalur Gaza dan Tepi

Barat dan menolak isu teritorial, sebab isu teritorial pendudukan adalah sebagai bagian dari status final wilayah. Dalam perundingan ini terdapat kemajuan bagi perjuangan rakyat Palestinadengan adanya kecaman keras terhadap tindakan militer Israel melakukan deportasi atas pemuda Palestina dan kesediannya mengikuti keinginan PLO agar penasehat politik PLO diijinkan tiba di Washington sebagai anggota perundingan, padahal Israel telahmenyatakan keberatan. Dalam Konferensi Washington delegasi Israel justrumembatalkan usulan penarikan pasukan, tidak menyebut-nyebut otoritas terpilih danmenuntut Israel sebagai satu – satunya yang berhak mengurus keamanan dalam segalaaspeknya, pemerintahan politik, social dab semua segi kehidupan maka tampak sekaliIsrael mengeraskan sikapnya menolak menyerahkan daerah pendudukan. (Ridho 2015)

4. Perundingan Oslo I

Perundingan Oslo di Norwegia dilakukan pada tanggal 13 September 1993. Israel yang di wakili oleh Yitzhak Rabin bernegosiasi dengan Palestina yang di wakili olehorang- orang dari Palestine Liberation Organization (PLO). Bentuk dari perundingan ini sejatinya merupakan perundingan yang di dalangi atas inisiatif Amerika Serikat. Hal ini pun di tandai dengan tempat penandatanganan hasil perjanjian Oslo yang bertempat dihalaman gedung Putih Amerika Serikat di Washington DC dan di saksikan pula oleh Presiden amerika yang menjabat saat itu Bill Clinton pada tanggal 13 September 1993. Dalam perjanjian Oslo yang pertama ini menghasilkan poin poin penting bagikedua belah pihak Negara. Di katakana bahwa pertama, Israel akan menyetujui pembentukan pemerintahan otonomi (otoritas Paestina). Keuda, wilayah “pemerintahan” yang di

berikanhanya Gaza dan Jericho dan ketiga, secara bertahap Israel akan menarik mundur tentaranya dari Tepi Barat, namun Israel pun meminta imbalan yang sepadan atas hal-hal yang akandi lakukan oleh Israel sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, yaitu Palestina harus dan mau melakukan yaitu Palestina harus mengakui kedaulatan Israel. Kedua, Menjaga keamanan orang-orang Israel dari serangan “teroris”. (Ridho 2015)

Atas kesepakatan tersebut Israel pun segera merealisasikannya dengan memberikan kuasa atas wilayah Gaza, Jericho, Tepi Barat dan Tel Aviv kepada Palestina. Sayangnya penduduk yang mendiami wilayah itu tetap tidak tunduk kepada pemerintah otoritas Palestina namun kepada pemerintah Israel. Persiapan akan penyelenggaraan pemilu Palestina untuk yang pertama kalinya pun di siapkan oleh aparat pemerintahan. Disamping itu setelah di tanda tanganinya perjanjian Oslo ini harapan Palestina untuk menjadi sebuah Negara pun sudah mulai tampak, hal ini di tandai dengan di kibarkannya bendera Palestina dan di nyanyikannya lagu kebangsaan Palestian. Bukan hanya itu saja namun layaknya Presiden foto Yaser Arafat terpasang di dinding-dinding gedung instansi pemerintahan dan di sekolah-sekolah. Disini Negara Palestina memang belum berdiri, namun rumusan dan identitas dirinya sudah mulai nampak kuat.

5. Perjanjian Oslo II

Perjanjian Oslo ke dua hadir sebagai satu ekstensionisasi dari perjanjian Osloyang kedua. Seperti perjanjian Oslo I dalam perjanjian Oslo II ini pun Amerika Serikat memiliki andil besar dalam tahap penyelenggaraannya. Kesepakatan oslo sendiri tercetus di Taba dan tandatangani di Washington DC pada tanggal 28 September 1995. Tidak seperti perjanjian Oslo I, pada perjanjian Oslo II ini prosesnya lebih mudah karena selain di langsung

secara terbuka namun dari pihak Palestina dan Israel sendiri pun memberi dukungan hal itu dapat di lihat dari peran aktif media masa yang selalumenyoroti hal ini. Koran harian terkemuka yang terdpat di Palestina Al fajar dan dariIsrael AL Quds pun menyatakan bahwa sering membritakan tentang persatuan dari kedua beah pihak Negara dan seminimal mungkin menggunakan kata-kata yang bersifat profokatif seperti revolusi. (Ridho 2015)

Pada perjanjian Oslo II ini terdapat poin utama yang berhasil di capai yaitutentang pembagian wilayah Tepi Barat kepada tiga zona A, B dan C. Pada zona A yang hanya 3 % dari wilayah Tepi Barat secara penuh di bawah kontrol otoritas Palestina, AreaC seluas 70% wilayah Tepi Barat berada dibawah kontrol militer Israel kemudian sisanya, area B (yang berada di sebagian Gaza, di sebut Yellow Area), yaitu wilayah yangdi kontrol bersama oleh Israel dan Palestina. Dalam deklarasi tersebut juga di tegaskan bahwasanya Palestina harus menyelenggarakan pemilu yang terbuka, jujur dan adilsebagai langkah awal dari pencapaian hak- hak rakyat Palestina.Paska di sepakatinya perjanjian Oslo II maka serangkaian realisasi pun dilaksanakan. Betlehem kota yang selalu di perebutkan oleh kedua belah pihak Negara ini akhirnya pada tanggal 21 Desember 1995 di kembalikan kepada pemerintah otonomPalestina oleh pemerintah Israel. Kejadian yang bersejarah pula terjadi paska penandatanganan perjanjian Oslo II ini bagi Palestina yaitu dengan di selenggarakannyaPemilihan Umum yang pertama di Palestina. Pemilihan umum yang pertama ini terjadi pada tanggal 20 Januari 1996. Tujuan dari di selenggarakannya pemilu ini tidak lain untuk menggangk faraksi- fraksi yang mendukung persetujuan Oslo untuk menduduki parlemen. Hasilnya, sejumlah 88% dari

kursi parlemen diduduki oleh anggota PLO yang menyetujui atas hasil kesepakatan Oslo.

6. Perundingan Wye River I

Perundingan Wye River I merupakan usaha presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalanm buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan. Dari pertemuan-pertemuan selama 9 hari di Wye Plentation Maryland, Amerika Serikat. Kemudian tercapai kesepakatan yang menghasilkan memorandum Wye River I tanggal 23 oktober 1998. Ketentuan- ketentuan dari memorandum Wye River I sebenarnya merupakan kelanjutan dari ketentuan Oslo II dan protokol Hebron yang belum tuntas diimplementasikan oleh Israel. (Ridho 2015)

7. Perundingan Wye River II

Hasil kesepakatan Wye River I yang tidak diimplementasikan oleh pemerintah Netanyahu diupayakan untuk direalisasikan oleh penggantinya Ehud Barak. Dalam pertemua Palestina-Israel yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir, berhasil ditandatangani sebuah memorandum (yang lebih dikenal sebagai memorandum Wye River II) pada tanggal 4 september 1999. Disamping memuat ketentuan seperti yang sudah disebutkan daalam Wye River I, dalam kesepakatan yang terakhir ini juga dijumpai hal-hal baru serta revisi dari sebagian ketentuan Wye River I, seperti penundaan deklarasi negara Palestina merdeka sampai september 2000, pembatalan 3% cagar alam di lembag

Yordan, dan ketentuan tentang dimulainya perundingan status Final. Kesepakatan ini akan berlaku efektif mulai 10 september 1999. (Ridho 2015)

8. Perundingan Camp David 2000

Pada tanggal 12 Juli 2000, Presiden Bill Clinton mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Presiden Palestina Yasser Arafat ke Camp David dengan maksud mendiskusikan masa depan pembicaraan damai. Pertemuan ini dianggap penting karena membangkitkan kembali kenangan dari perundingan perdamaian yang pernah diprakarsai oleh Presiden Jimmy Carter di Camp David pada tahun 1979. Setelah sembilan hari bernegosiasi secara intensif yang dilakukan hingga tanggal 20 Juli 2000, kedua belah pihak mendeklarasikan bahwa tidak mungkin menghasilkan sebuah resolusi. Presiden Clinton lalu menengahi, dan meminta pihak-pihak yang berseteru untuk tetap melanjutkan perundingan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeline Albright bekerja bersama para pihak yang berkonflik dan juga para mediator lainnya. Namun, kedua belah pihak bersikeras menyatakan bahwa pertemuan ini gagal karena para perunding dari pihak Palestina tidak bisa menerima tawaran yang diajukan oleh pihak Israel yang akan membagi Palestina menjadi empat kantong utama dimana masing-masing wilayah akan dipisahkan oleh tanah orang Israel. Dan hal yang paling tidak bisa diterima adalah dimana Israel menginginkan Yerusalem berada dibawah otoritas Israel. (Gary. M 2010)

9. Perundingan di Geneva Swiss Oktober 2003

Perundingan diprakarsai Yossi Belilin (mantan menteri Israel) dan Yossi Abeer Rabbo (mantan menteri penerangan). Isi perundingan ini menyepakati penyerahan 25,5%

pemukiman Israel untuk bangsa Palestina. Namun perjanjian ini pun tidak mencapai hasil karena Ariel Sharon terus melakukan tindakan penyimpangan-penyimpangan. (Fuhaidah 2012)

Perkembangan mutakhir saat itu bahkan menunjukkan bahwa Sharon memerintahkan pendirian zona pengaman yang tidak dapat dimasuki warga Palestina di Gaza Utara, kebijakannya diumumkan pada rapat kabinet dan pejabat keamanan pada Minggu, 25 Desember 2005. Zona pengaman ini lebarnya 2,5 km dan panjangnya membentang mulai dari bagian utara hingga pinggir timur Jalur Gaza. Selain membangun zona pengaman Israel juga sedang merencanakan membangun 228 rumah tambahan di pemukiman Yahudi.

Tindakan Ariel Sharon di atas dinilai sebagai pelanggaran paling nyata terhadap komitmen Israel menjalankan peta perjanjian damai yang didukung Amerika Serikat. Peta perjanjian damai ini dicetuskan pada 3 Juli 2003 di Sharm el Sheikh Sinai pada KTT Arab-Amerika. Salah satu hasil perundingan ini adalah larangan bagi Israel untuk menghentikan semua pembangunan pemukiman Yahudi. Akan tetapi perundingan demi perundingan tidak pernah berbuah manis. Konflik Palestina-Israel masih terus berlangsung sampai saat ini. Insiden berdarah antar dua kelompok itu masih sering diliput oleh media massa maupun media elektronik. Palestina melewati jalan berliku dan terjal untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh baik secara internal maupun eksternal. (e. a. Hugh Miall 2002)

10. Perundingan Annapolis 2007

Agenda konferensi Annapolis mencakup enam masalah pokok yaitu Negara kedaulatan Palestina, status final kota Jerussalem sebagai ibukota Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua minggu sekali dengan AS bertindak sebagai penengah. (Ridho 2015)

Awal masa konferensi Annapolis memang terjadi gencatan senjata antara pejuang Hamas dan tentara Israel, terutama di Jalur Gaza selama beberapa bulan. Tetapi disaat presiden Palestina Mahmoud Abbas dan perdana menteri Israel Ehud Olmert berunding, pembangunan pemukiman Yahudi di Al-Quds Timur justru ditingkatkan oleh pemerintah Isreal. Adapun pasca konferensi Annapolis pertengahan tahun 2008 keadaan Israel-Palestina konflik mulai bergejolak terutama di daerah Gaza yang merupakan basis kelompok Hamas. Pemberlakuan blockade ekonomi oleh Israel di Gaza membuat banyak warga Gaza menderita kelaparan, kekurangan obat, dan kekurangan sumber-sumber kehidupan, misalnya listrik padam, pembatasan bantuan makanan dari masyarakat internasional dan macetnya distribusi bahan bakar. (Ananta 2008)

Kesepatan akhir dari konferensi Annapolis untuk menciptakan Negara Palestina yang berdaulat berdampingan dengan Negara Isreal yang berdaulat secara damai.tetapi dengan perkembangan situasi konflik Israel-Palestina yang masih rentan proses perdamaian kedua Negara masih jauh dari proses perwujudan perdamaian. Apalagi Israel tetap berthan dengan kebijakan politiknya yang serba tolak terhadap palestina. Secara tegas

Israel menolak pembekuan pembangunan pemukiman yahudi, menolak pembicaraan masa depan tentang Yerusalem yang telah diduduki sejak perang 1967. Dengan demikian Israel secara langsung menghambat proses pembentukan Negara Palestina yang berdaulat, Yerusalem sebagai ibukota Palestina.

11. Perundingan Langsung 2010

Berulang kali perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel diadakan tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Dalam bulan September 2010, ada dua putaran pertemuan di antara mereka. Tanggal 1-2 September 2010, diadakan pertemuan di Washington. Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, menjadi tuan rumah. Obama didampingi Presiden Mesir, Hosni Mubarak, dan Raja Yordania, Abdullah. Mereka berhadapan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu. (Basyar 2010)

Ketika membuka perundingan itu, Obama menyatakan bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memperlihatkan keberanian untuk mencapai suatu perdamaian. Memang, itu tidak mudah mewujudkannya. Tetapi Obama berusaha terus mendukung penuh kedua belah pihak mengejar perdamaian. AS tidak akan memaksakan sebuah solusi atau memberikan hal lebih dari yang diharapkan masing-masing pihak. Tentu, tidak semua usaha akan berhasil dengan sukses. Resiko kegagalan tidak dapat dihindari dari suatu perundingan.

Mereka kemudian sepakat bertemu lagi pada 14-15 September 2010 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Sebenarnya, pada pertemuan putaran kedua ini ada banyak agenda yang akan didiskusikan. Paling tidak ada enam persoalan, yaitu: perbatasan, keamanan,

pengungsi, Yerusalem, pengaturan air, dan masalah ekonomi. Masalah perbatasan mencakup batas wilayah Palestina-Israel, permukiman, dan lalu lintas yang aman bagi Palestina antara Tepi Barat dan Jalur Gaza. Masalah keamanan meliputi permasalahan di perbatasan, penggunaan Israel atas udara Palestina, demiliterisasi, dan tempat peringatan dini; Masalah pengungsi berkaitan dengan aspek hukum hak sipil pengungsi Palestina yang ada di berbagai negara; Masalah Yerusalem berhubungan dengan kedaulatan tempat suci dan kerjasama pengaturan wilayah di sana antara Palestina dan Israel. Masalah air berkaitan dengan hak atau rencana pengaturan dan pembagian air dan masalah ekonomi mencakup perdagangan, pajak, serta ganti rugi terhadap Palestina, akibat pendudukan Israel. (Basyar 2010)